

KETEGANGAN SOSIAL SEBAGAI TANDA ZAMAN: REFLEKSI TEOLOGI PASTORAL ATAS POLEMIK PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI INDONESIA

Mira Titania¹, Roida Sihombing^{2*}, Sutami³, Gregorius Kukuh⁴

^{1,2,3,4} Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

*e-mail: roidasihombing7@gmail.com

Abstrak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah Indonesia bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Namun, implementasi program ini memunculkan berbagai polemik sosial, seperti persoalan kualitas makanan, kasus keracunan makanan, serta ketimpangan kesejahteraan antara pelaksana program dan guru honorer. Situasi tersebut memperlihatkan adanya ketegangan sosial dalam masyarakat yang dapat dibaca sebagai “tanda zaman” dalam perspektif teologi pastoral. Penelitian ini bertujuan menganalisis polemik Program MBG melalui pendekatan teologi pastoral dengan menggunakan metode pastoral circle yang meliputi tahap see, judge, dan act. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap dokumen Gereja, ajaran sosial Gereja, serta berbagai penelitian ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa polemik Program MBG tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis kebijakan publik, tetapi juga menyangkut dimensi keadilan sosial, martabat manusia, solidaritas, dan tanggung jawab moral dalam pengelolaan kesejahteraan masyarakat. Dalam terang ajaran sosial Gereja, khususnya Fratelli Tutti dan Evangelii Gaudium, fenomena ini menjadi panggilan pastoral bagi Gereja untuk hadir secara profetis dalam memperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, ketegangan sosial yang muncul dapat menjadi ruang refleksi iman sekaligus kesempatan untuk memperkuat solidaritas sosial dalam kehidupan masyarakat.

Kata kunci: ketegangan sosial; tanda zaman; teologi pastoral; makan bergizi gratis, ajaran sosial Gereja

Abstract

The Free Nutritious Meal Program (Program Makan Bergizi Gratis/MBG) initiated by the Indonesian government aims to improve the nutritional quality of society, particularly among school children. However, the implementation of this program has generated various social controversies, including issues related to food quality, cases of food poisoning, and disparities in welfare between program staff and honorary teachers. This situation reflects the emergence of social tensions within society that can be interpreted as “signs of the times” from the perspective of pastoral theology. This study aims to analyze the controversies surrounding the MBG Program through a pastoral theological approach using the pastoral circle method,

which consists of the stages of see, judge, and act. The study employs a qualitative approach through literature review of Church documents, Catholic social teachings, and relevant scholarly studies. The findings indicate that the controversies surrounding the MBG Program are not merely related to technical aspects of public policy, but also involve dimensions of social justice, human dignity, solidarity, and moral responsibility in the management of social welfare. In light of Catholic social teaching, particularly Fratelli Tutti and Evangelii Gaudium, this phenomenon becomes a pastoral call for the Church to be prophetically present in promoting social justice and the common good. Therefore, the social tensions that arise may become a space for theological reflection as well as an opportunity to strengthen social solidarity within society.

Keywords: *social tension; signs of the times; pastoral theology; free nutritious meal program; Catholic social teaching*

PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan sosial pemerintah Indonesia yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia. Program ini lahir dari keprihatinan terhadap persoalan malnutrisi, stunting, dan ketimpangan akses pangan bergizi yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah di Indonesia. Dalam konteks pembangunan sosial, program makan sekolah dipandang sebagai instrumen penting untuk mendukung kesehatan anak, meningkatkan partisipasi pendidikan, serta memperkuat kesejahteraan keluarga miskin (Bundy et al., 2009; Drake et al., 2021).

Namun demikian, implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga memunculkan sejumlah polemik dan tantangan dalam ruang publik. Berbagai kajian menyoroti persoalan koordinasi antarinstansi, kesiapan infrastruktur distribusi, pengawasan mutu dan keamanan pangan, keberlanjutan pembiayaan program, serta efektivitas tata kelola pada tingkat daerah (Iqbal et al., 2025; Marzulina et al., 2025; Hadinata, 2026). Di samping itu, respons masyarakat di media digital menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap transparansi pelaksanaan program, kualitas layanan yang diterima masyarakat, serta keadilan dalam distribusi manfaat program sosial (Priyantomo et al., 2026). Selain itu, kajian kebijakan publik juga menyoroti pentingnya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan agar Program Makan Bergizi Gratis dapat mencapai tujuan kesejahteraan sosial secara efektif. Transparansi dalam pengelolaan program, keterbukaan informasi publik, mekanisme pengawasan yang memadai, serta sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan dipandang sebagai prasyarat penting

untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menjamin efektivitas implementasi kebijakan (Hadinata, 2026; Wibowo & Yuliani, 2026). Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sosial berskala nasional tidak hanya menghadapi tantangan teknis dan administratif, tetapi juga berpotensi memunculkan dinamika sosial yang kompleks dalam masyarakat, terutama ketika muncul perdebatan mengenai akuntabilitas, pemerataan manfaat, dan keadilan sosial dalam pelaksanaannya.

Dalam perspektif ilmu sosial, ketegangan sosial sering muncul ketika masyarakat merasakan adanya ketimpangan dalam distribusi kesejahteraan maupun ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dan realitas pelaksanaannya (Chaithawee et al., 2024; Stiglitz, 2013; Piketty, 2022). Kritik masyarakat terhadap program MBG menunjukkan meningkatnya sensitivitas publik terhadap isu keadilan sosial, transparansi kebijakan, dan akuntabilitas penyelenggaraan program sosial (Priyantomo et al., 2026). Dengan demikian, polemik yang muncul dalam program MBG tidak hanya berkaitan dengan persoalan administratif, tetapi juga menyangkut dimensi moral dan kemanusiaan dalam kehidupan bersama.

Dalam terang iman Kristiani, realitas sosial seperti ini dapat dibaca sebagai “tanda zaman.” Konsili Vatikan II menegaskan bahwa Gereja memiliki tanggung jawab untuk “menyelidiki tanda-tanda zaman dan menafsirkannya dalam terang Injil” agar mampu merespons persoalan konkret manusia dalam setiap zaman (Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes*, art. 4). Selain itu, Gereja juga dipanggil untuk mengenali karya Allah dalam dinamika sejarah dan kehidupan sosial manusia (Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes*, art. 11). Dengan demikian, ketegangan sosial yang muncul dalam masyarakat bukan semata-mata dipahami sebagai konflik destruktif, melainkan dapat menjadi ruang refleksi teologis mengenai keadilan, solidaritas, dan martabat manusia.

Berbagai penelitian mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) umumnya berfokus pada aspek kebijakan publik, kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, dan pembangunan sumber daya manusia. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa program MBG memiliki potensi untuk meningkatkan status gizi peserta didik dan mendukung pembangunan sosial, sekaligus menghadapi berbagai tantangan implementasi yang berkaitan dengan tata kelola, distribusi, pengawasan, pembiayaan, transparansi, dan kepercayaan publik (Iqbal et al., 2025; Marzulina et al., 2025; Hadinata, 2026; Priyantomo et al., 2026; Wibowo & Yuliani, 2026).

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih menempatkan polemik dan ketegangan sosial yang muncul dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kerangka analisis kebijakan publik, kesehatan masyarakat, dan

pembangunan sosial. Berbagai kajian lebih banyak berfokus pada efektivitas program, tata kelola kebijakan, distribusi manfaat, kualitas layanan, serta dampaknya terhadap peningkatan gizi dan kesejahteraan masyarakat (Iqbal et al., 2025; Marzulina et al., 2025; Hadinata, 2026; Priyantomo et al., 2026; Wibowo & Yuliani, 2026). Kajian yang secara khusus merefleksikan dinamika tersebut dalam perspektif teologi pastoral masih relatif terbatas. Padahal, dalam perspektif teologi pastoral, berbagai ketegangan sosial yang muncul dalam kehidupan masyarakat dapat dibaca sebagai “tanda zaman”, yakni realitas sosial yang mengandung panggilan untuk melakukan refleksi kritis dalam terang Injil dan ajaran sosial Gereja (Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes*, art. 4, 11). Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan menganalisis polemik dan ketegangan sosial yang muncul dalam implementasi Program MBG sebagai tanda zaman dalam perspektif teologi pastoral. Melalui pendekatan *pastoral circle*, penelitian ini bertujuan mengkaji makna teologis dari dinamika sosial tersebut sekaligus merumuskan implikasi pastoral bagi kehadiran Gereja dalam memperjuangkan keadilan sosial, solidaritas, dan kesejahteraan bersama di tengah masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode refleksi teologi pastoral. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada interpretasi makna sosial dan refleksi teologis terhadap polemik Program Makan Bergizi Gratis dalam konteks kehidupan masyarakat.

Metode yang digunakan adalah *pastoral circle*, yaitu pendekatan refleksi pastoral yang berkembang dalam tradisi teologi sosial dan teologi pembebasan. Metode ini berakar pada pendekatan “see, judge, act” yang dikembangkan oleh Joseph Cardijn dan kemudian diperdalam oleh Joe Holland dan Peter Henriot melalui karya *Social Analysis: Linking Faith and Justice* (1983). Pendekatan ini bertujuan mengintegrasikan analisis sosial, refleksi iman, dan tindakan pastoral dalam merespons realitas sosial secara kontekstual (Holland & Henriot, 1983).

Secara umum, *pastoral circle* terdiri atas tiga tahap utama, yaitu melihat (see), menilai (judge), dan bertindak (act). Pada tahap melihat (see), peneliti menganalisis realitas sosial yang muncul dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis melalui studi literatur terhadap artikel ilmiah, dokumen Gereja, laporan kebijakan

publik, dan publikasi akademik yang relevan dengan isu kebijakan sosial, ketimpangan kesejahteraan, dan program nutrisi sekolah.

Tahap menilai (*judge*) dilakukan dengan merefleksikan realitas sosial tersebut dalam terang iman Kristiani dan ajaran sosial Gereja. Pada tahap ini digunakan prinsip-prinsip ajaran sosial Gereja seperti martabat manusia, solidaritas, subsidiaritas, dan kesejahteraan bersama sebagaimana tercermin dalam dokumen *Evangelii Gaudium* (Francis, 2013) dan *Fratelli Tutti* (Francis, 2020). Refleksi teologis ini bertujuan menilai realitas sosial secara kritis sekaligus menemukan makna iman di balik fenomena yang terjadi.

Data diperoleh dari berbagai sumber literatur dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan tahapan *pastoral circle*, yaitu *see*, *judge*, dan *act*. Pada tahap *see*, peneliti mengidentifikasi dan mendeskripsikan berbagai polemik serta bentuk ketegangan sosial yang muncul dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis berdasarkan temuan penelitian terdahulu, dokumen kebijakan, dan sumber-sumber ilmiah yang relevan. Pada tahap *judge*, data tersebut direfleksikan secara teologis dengan menggunakan konsep “tanda zaman” dalam *Gaudium et Spes* serta prinsip-prinsip ajaran sosial Gereja untuk menafsirkan makna teologis dari dinamika sosial yang terjadi. Selanjutnya, pada tahap *act*, hasil refleksi teologis digunakan untuk merumuskan implikasi dan rekomendasi pastoral yang dapat mendukung terwujudnya keadilan sosial, solidaritas, dan kesejahteraan bersama. Kesimpulan penelitian ditarik melalui sintesis antara hasil analisis sosial dan refleksi teologis sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai polemik Program Makan Bergizi Gratis sebagai tanda zaman dalam perspektif teologi pastoral (Bevans, 2018; Schreiter, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Program Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif Kebijakan Sosial

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan perlindungan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan anak-anak usia sekolah. Dalam berbagai negara berkembang, program makan sekolah telah menjadi instrumen penting dalam kebijakan sosial karena mampu menghubungkan sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia secara terpadu. Penelitian global menunjukkan bahwa program nutrisi sekolah tidak hanya berkontribusi pada peningkatan status gizi anak, tetapi juga berdampak positif terhadap tingkat

kehadiran siswa, kemampuan belajar, serta partisipasi pendidikan secara umum (Gelli et al., 2019; Drake et al., 2021).

Selain berfungsi meningkatkan kualitas gizi anak, program makan sekolah juga dipahami sebagai bagian dari strategi perlindungan sosial bagi keluarga miskin dan kelompok rentan. Program ini membantu mengurangi beban ekonomi rumah tangga sekaligus menjadi bentuk intervensi negara dalam mengatasi kerentanan sosial yang dialami masyarakat. Dalam konteks ini, program makan sekolah tidak hanya berfungsi sebagai intervensi nutrisi, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi kesejahteraan yang membantu keluarga miskin mempertahankan akses pendidikan anak-anak mereka. Penelitian menunjukkan bahwa program makan sekolah dapat menjadi mekanisme distribusi kesejahteraan yang efektif apabila didukung oleh tata kelola, pengawasan, dan implementasi program yang baik (Verguet et al., 2020). Program yang dikelola secara efektif bahkan mampu memberikan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat penerima manfaat (Watkins, 2022).

Dalam konteks Indonesia, kebijakan sosial yang berorientasi pada pembangunan manusia terus mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah berupaya memperluas berbagai program bantuan sosial sebagai bagian dari strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sosial di Indonesia sering menghadapi tantangan terkait koordinasi kelembagaan, distribusi manfaat, pengawasan anggaran, dan efektivitas pelaksanaan program di lapangan (Aspinall, 2014). Dalam banyak kasus, persoalan implementasi kebijakan sosial tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan administratif, tetapi juga dengan persoalan transparansi, koordinasi birokrasi, dan ketepatan distribusi manfaat program. Situasi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan sosial tidak hanya ditentukan oleh tujuan normatif kebijakan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola serta persepsi keadilan yang dirasakan masyarakat dalam implementasinya.

Dalam kerangka tersebut, Program MBG dapat dipahami sebagai upaya negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini melalui pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah. Akan tetapi, munculnya berbagai polemik dalam implementasi program menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak pernah sepenuhnya bebas dari dinamika sosial yang kompleks. Ketegangan sosial yang berkembang di tengah masyarakat memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal kebijakan dan pengalaman konkret masyarakat dalam pelaksanaannya. Dalam situasi seperti ini, keberhasilan kebijakan sosial tidak hanya ditentukan oleh efektivitas program, tetapi juga

oleh sejauh mana masyarakat merasakan adanya keadilan dan transparansi dalam implementasi kebijakan tersebut. Dengan demikian, persoalan yang muncul dalam Program MBG bukan hanya menyangkut aspek teknis administrasi, tetapi juga berkaitan dengan keadilan sosial dan legitimasi sosial kebijakan negara di mata masyarakat.

2. Ketegangan Sosial dan Persoalan Keadilan dalam Implementasi Kebijakan

Polemik yang muncul dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan bahwa kebijakan publik selalu memiliki dimensi sosial dan moral yang memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap suatu program pemerintah. Dalam teori keadilan distributif, suatu kebijakan akan sulit memperoleh legitimasi sosial apabila masyarakat memandang distribusi manfaat dan beban dalam kebijakan tersebut tidak dilakukan secara adil (Rawls, 1999). Oleh karena itu, ketegangan sosial yang muncul dalam polemik MBG tidak dapat dipahami hanya sebagai reaksi emosional masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk sensitivitas sosial terhadap persoalan keadilan dan kesejahteraan.

Dalam berbagai diskursus publik, kritik terhadap Program MBG tidak hanya berkaitan dengan kualitas makanan atau efektivitas distribusi program, tetapi juga menyentuh persoalan ketimpangan kesejahteraan antara berbagai kelompok profesi dalam sistem pendidikan. Sorotan terhadap kesejahteraan guru honorer menjadi salah satu contoh bagaimana masyarakat memandang adanya ketimpangan perhatian negara terhadap berbagai aktor dalam sistem pendidikan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas pendidikan memiliki hubungan erat dengan kesejahteraan, stabilitas kerja, dan kualitas profesional para guru (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2020; Sorensen & Ladd 2020). Ketidakamanan ekonomi dan rendahnya kesejahteraan pendidik dapat memengaruhi kualitas pembelajaran serta keberlangsungan proses pendidikan. Oleh karena itu, ketika kesejahteraan pendidik diabaikan, masyarakat dapat memandang kebijakan sosial sebagai bentuk pembangunan yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sosial tidak hanya diukur dari tercapainya tujuan program, tetapi juga dari kemampuan kebijakan tersebut menciptakan rasa keadilan sosial di tengah masyarakat. Ketimpangan distribusi kesejahteraan berpotensi memunculkan rasa ketidakpuasan sosial apabila masyarakat melihat adanya perlakuan yang tidak seimbang antara kelompok-kelompok tertentu. Dalam konteks ini, polemik MBG memperlihatkan bahwa kebijakan kesejahteraan yang tidak disertai tata kelola yang adil justru dapat melahirkan bentuk baru ketegangan sosial.

Di sisi lain, meningkatnya kritik masyarakat terhadap Program MBG juga menunjukkan berkembangnya kesadaran publik terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas kebijakan negara. Dalam masyarakat demokratis, partisipasi publik dalam mengawasi kebijakan sosial merupakan bagian penting dari kehidupan politik yang sehat. Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment menjelaskan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pengakuan martabat, keadilan, dan kesetaraan sosial merupakan bagian penting dari dinamika demokrasi modern (Fukuyama, 2018). Dalam konteks tersebut, kritik terhadap kebijakan publik tidak selalu harus dipahami sebagai ancaman terhadap pemerintah, tetapi dapat menjadi bentuk partisipasi sosial yang membantu evaluasi dan perbaikan kualitas kebijakan di masa depan.

Dengan demikian, ketegangan sosial dalam polemik Program MBG pada dasarnya memperlihatkan adanya pergulatan masyarakat mengenai keadilan distributif, kesejahteraan sosial, dan tanggung jawab negara terhadap warga. Ketegangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sosial tidak hanya berkaitan dengan distribusi bantuan material, tetapi juga menyangkut pengakuan terhadap martabat manusia, rasa keadilan, dan kepercayaan publik terhadap kebijakan negara.

3. Ketegangan Sosial sebagai “Tanda Zaman” dalam Perspektif Teologi Pastoral

Dalam tradisi teologi Katolik, realitas sosial yang dipenuhi konflik, ketimpangan, dan pergulatan kemanusiaan tidak dipahami semata-mata sebagai persoalan duniawi, tetapi juga sebagai ruang kehadiran Allah dalam sejarah manusia. *Gaudium et Spes* menegaskan bahwa Gereja dipanggil untuk “menyelidiki tanda-tanda zaman dan menafsirkannya dalam terang Injil” agar mampu memahami pergulatan manusia dalam konteks sosial yang terus berubah (Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes*, art. 4). Perspektif ini menunjukkan bahwa berbagai dinamika sosial dalam masyarakat dapat menjadi *locus* refleksi iman dan tanggung jawab pastoral Gereja.

Konsep “tanda zaman” dalam teologi pastoral mengandung pemahaman bahwa berbagai peristiwa sosial dapat menjadi sarana bagi umat beriman untuk membaca karya Allah dalam sejarah manusia. Dengan demikian, ketegangan sosial yang muncul dalam polemik Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya dipandang sebagai konflik sosial semata, tetapi juga sebagai undangan bagi Gereja untuk merefleksikan persoalan keadilan, solidaritas, dan martabat manusia secara lebih mendalam. Gereja dipanggil untuk hadir dalam realitas sosial bukan sekadar sebagai pengamat moral, melainkan sebagai komunitas

iman yang secara profetis terlibat dalam memperjuangkan keadilan, solidaritas, dan martabat manusia di tengah kehidupan masyarakat.

Dalam refleksi teologi sosial kontemporer, keterlibatan Gereja dalam isu keadilan sosial dipandang sebagai bagian integral dari misi evangelisasi. Paus Francis dalam *Evangelii Gaudium* menegaskan bahwa pewartaan Injil tidak dapat dipisahkan dari perhatian terhadap mereka yang mengalami ketidakadilan dan penderitaan sosial (Francis, 2013). Gereja dipanggil untuk memiliki dimensi profetis yang mampu menyuarakan solidaritas, pembelaan terhadap martabat manusia, dan keberpihakan terhadap kesejahteraan bersama. Perspektif ini menunjukkan bahwa iman Kristiani memiliki dimensi sosial yang menuntut keterlibatan nyata dalam berbagai persoalan kehidupan masyarakat.

Dalam konteks polemik Program MBG, Gereja dapat membaca fenomena tersebut sebagai pengingat bahwa pembangunan sosial tidak hanya menyangkut keberhasilan administratif, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai moral yang mendasari kehidupan bersama. Ketika masyarakat mengalami ketidakpuasan akibat ketimpangan sosial, Gereja dipanggil untuk menghadirkan ruang dialog yang mendorong terciptanya solidaritas dan perhatian terhadap kelompok-kelompok yang mengalami ketidakadilan. Orobator (2016) menegaskan bahwa Gereja kontemporer dipanggil untuk semakin terlibat dalam persoalan sosial konkret yang mempengaruhi kehidupan umat dan masyarakat. Perspektif ini menunjukkan bahwa pelayanan pastoral Gereja tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosial untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bersama.

Selain itu, prinsip solidaritas dalam ajaran sosial Gereja juga memiliki relevansi penting dalam memahami fenomena ini. Solidaritas tidak hanya dipahami sebagai rasa simpati terhadap penderitaan orang lain, tetapi sebagai komitmen moral untuk memperjuangkan *bonum commune* atau kesejahteraan bersama. Dalam *Compendium of the Social Doctrine of the Church*, solidaritas dipahami sebagai dasar kehidupan sosial yang menempatkan kesejahteraan setiap pribadi sebagai bagian dari tanggung jawab bersama (Pontifical Council for Justice and Peace, 2004). Oleh karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan anak-anak melalui program nutrisi sekolah seharusnya juga disertai perhatian terhadap kelompok-kelompok lain yang berperan dalam sistem pendidikan, termasuk para pendidik dan keluarga miskin.

Dengan demikian, ketegangan sosial yang muncul dalam polemik Program MBG dapat dipahami sebagai “tanda zaman” yang mengundang refleksi iman secara lebih mendalam. Fenomena ini memperlihatkan bahwa pembangunan sosial yang mengabaikan rasa keadilan berpotensi melahirkan ketidakpercayaan dan konflik sosial baru. Dalam

terang teologi pastoral, situasi tersebut menjadi panggilan bagi Gereja untuk terus menghadirkan nilai-nilai Injil dalam upaya membangun masyarakat yang lebih adil, solider, dan manusiawi.

4. Implikasi Pastoral bagi Kehadiran Gereja di Tengah Masyarakat

Refleksi teologi pastoral terhadap polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membawa implikasi penting bagi kehadiran Gereja dalam kehidupan sosial masyarakat. Gereja tidak hanya dipanggil untuk memberikan pelayanan spiritual, tetapi juga untuk terlibat secara aktif dalam membangun kesadaran moral dan solidaritas sosial. Dalam tradisi ajaran sosial Gereja, keterlibatan tersebut dipahami sebagai bagian dari dimensi sosial evangelisasi, yaitu menghadirkan nilai-nilai Injil dalam realitas konkret kehidupan manusia.

Penelitian mengenai peran Gereja dalam pembangunan sosial menunjukkan bahwa lembaga-lembaga keagamaan memiliki kontribusi penting dalam memperkuat kohesi sosial dan membangun solidaritas masyarakat (Clarke & Jennings, 2008). Dalam konteks ketegangan sosial akibat kebijakan publik, Gereja dapat berperan sebagai mediator sosial yang mendorong dialog antara masyarakat, pemerintah, dan kelompok-kelompok yang mengalami ketidakadilan. Kehadiran pastoral Gereja dalam situasi semacam ini memiliki peran penting dalam membangun budaya dialog, solidaritas sosial, dan tanggung jawab bersama di tengah masyarakat.

Selain itu, Gereja juga dapat mengembangkan pendidikan sosial bagi umat melalui refleksi etis mengenai kebijakan publik dan keadilan sosial. Pendidikan pastoral semacam ini penting agar umat tidak hanya memahami iman dalam dimensi spiritual, tetapi juga mampu mengembangkan kepekaan sosial terhadap persoalan kemiskinan, ketimpangan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, Gereja dapat memperkuat pastoral sosial melalui seminar, pendidikan umat, pendampingan masyarakat, maupun advokasi sosial yang berpihak pada kelompok rentan.

Secara konkret, Gereja juga dapat mendorong pengembangan program pelayanan sosial yang mendukung kesejahteraan anak-anak sekolah dan para pendidik. Perhatian terhadap kesejahteraan guru honorer, misalnya, dapat menjadi bagian dari kepedulian pastoral Gereja terhadap martabat profesi pendidik. Dengan demikian, keterlibatan Gereja dalam persoalan sosial tidak berhenti pada refleksi moral semata, tetapi diwujudkan dalam praksis pastoral yang nyata dan kontekstual.

Pada akhirnya, refleksi teologi pastoral terhadap polemik Program MBG menunjukkan bahwa ketegangan sosial tidak selalu harus dipahami sebagai ancaman bagi

kehidupan bersama. Sebaliknya, dinamika tersebut dapat menjadi kesempatan bagi Gereja untuk memperbarui komitmennya dalam menghadirkan nilai-nilai Injil di tengah masyarakat. Dalam perspektif iman Kristiani, ketegangan sosial dapat menjadi ruang pertumbuhan solidaritas, refleksi moral, dan pembaruan tanggung jawab bersama dalam membangun kehidupan yang lebih adil, solider, dan manusiawi.

KESIMPULAN

Polemik yang muncul dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan bahwa kebijakan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak pernah terlepas dari dinamika sosial yang kompleks. Kritik yang berkembang terkait kualitas makanan, tata kelola program, serta ketimpangan kesejahteraan dalam dunia pendidikan memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal kebijakan dan pengalaman konkret masyarakat dalam pelaksanaannya. Fenomena tersebut menegaskan bahwa kebijakan sosial tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif dan teknis, tetapi juga menyangkut persoalan keadilan sosial, martabat manusia, dan kesejahteraan bersama.

Melalui pendekatan teologi pastoral dengan metode *pastoral circle*, penelitian ini menunjukkan bahwa polemik Program MBG dapat dipahami tidak hanya sebagai persoalan kebijakan publik, tetapi juga sebagai realitas sosial yang memiliki makna teologis. Pada tahap *see*, analisis memperlihatkan bahwa dinamika yang muncul dalam implementasi program berkaitan dengan persoalan tata kelola kebijakan sosial, keadilan distributif, dan meningkatnya sensitivitas masyarakat terhadap isu kesejahteraan sosial. Pada tahap *judge*, refleksi teologis menunjukkan bahwa dinamika sosial tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari “tanda-tanda zaman” yang mengundang Gereja untuk membaca realitas sosial dalam terang Injil. Dalam perspektif ajaran sosial Gereja, nilai-nilai seperti martabat manusia, solidaritas, dan *bonum commune* harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan yang menyangkut kehidupan masyarakat.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan anak-anak melalui program nutrisi sekolah merupakan langkah positif dalam upaya membangun kesejahteraan bersama. Namun demikian, keadilan sosial menuntut agar perhatian terhadap kesejahteraan tersebut juga disertai kepedulian terhadap kelompok-kelompok lain yang terlibat dalam sistem pendidikan, termasuk para pendidik dan masyarakat rentan lainnya. Dengan demikian, pembangunan sosial yang berkeadilan tidak dapat dilakukan secara

parsial, tetapi harus memperhatikan keseimbangan kesejahteraan seluruh pihak dalam kehidupan bersama.

Pada tahap *act*, refleksi pastoral menunjukkan bahwa Gereja memiliki peran penting dalam merespons dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Kehadiran Gereja tidak hanya terbatas pada pelayanan spiritual, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam membangun kesadaran moral, solidaritas sosial, dan budaya dialog. Gereja dipanggil untuk menghadirkan nilai-nilai Injil secara konkret melalui pendidikan sosial, refleksi etis, pendampingan masyarakat, serta keberpihakan terhadap mereka yang mengalami ketidakadilan sosial.

Dengan demikian, polemik Program MBG tidak harus dipahami semata-mata sebagai konflik sosial yang destruktif. Dalam perspektif teologi pastoral, dinamika tersebut dapat menjadi kesempatan bagi Gereja dan masyarakat untuk memperdalam refleksi mengenai pentingnya keadilan sosial, solidaritas, dan tanggung jawab bersama dalam membangun kehidupan yang lebih manusiawi. Realitas sosial yang penuh tantangan justru dapat menjadi ruang pertumbuhan iman sekaligus panggilan bagi Gereja untuk terus menghadirkan nilai-nilai Injil dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E. (2014). Health care and democratization in Indonesia. *Democratization*, 21(5), 803–823. <https://doi.org/10.1080/13510347.2013.873791>
- Bevans, Stephen B. 2018. *Models Of Contextual Theology*. New York: Maryknoll, NY: Orbis Books.
- Bundy, D., Burbano, C., Grosh, M., Gelli, A., Jukes, M., & Drake, L. (2009). *Rethinking school feeding: Social safety nets, child development, and the education sector*. World Bank.
- Chaithaweep, C., Harabuttra, T., Yoncheaun, W., & Ponnaksonkosa, N. (2024). Addressing inequality in developing countries: An integrated perspective and sustainable development approach. *Journal of Political Science Mahamakut Buddhist University*, 4(6), 226–240.
- Clarke, G., & Jennings, M. (2008). *Development, civil society and faith-based organizations: Bridging the sacred and the secular*. Palgrave Macmillan.
- Drake, L., Fernandes, M., Aurino, E., Burbano, C., Kiamba, J., Giyose, B., Gelli, A., Alderman, H., Mai, L., & Mitchell, A. (2021). Middle childhood and adolescence. In *Sensuality and sexuality across the divide of shame* (pp. 111–128). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203927014-11>

- Francis. (2013). *Evangelii gaudium*. Libreria Editrice Vaticana.
- Francis. (2020). *Fratelli tutti*. Libreria Editrice Vaticana.
- Fukuyama, F. (2018). *Identity: The demand for dignity and the politics of resentment*. Farrar, Straus and Giroux.
- Gelli, A., Aurino, E., Folson, G., Arhinful, D., Adamba, C., Osei-Akoto, I., Masset, E., Watkins, K., Fernandes, M., Drake, L., & Alderman, H. (2019). A school meals program implemented at scale in Ghana increases height-for-age during midchildhood in girls and in children from poor households: A cluster randomized trial. *The Journal of Nutrition*, 149(8), 1434–1442. <https://doi.org/10.1093/jn/nxz079>
- Hadinata, M. (2026). Free nutritious meal policy in Indonesia under President Prabowo: A policy, fiscal, and political analysis grounded in international evidence. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 18(1), 65–78. <https://doi.org/10.21787/jbp.18.2026.2896>
- Henriot, P., & Holland, J. (1983). *Social analysis: Linking faith and justice*. Orbis Books.
- Iqbal, M., Nurmansyah, N., Anna, A., & Fitriani, F. (2025). Applying an implementation research lens to Indonesia's free nutritious meal program. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 13(2), 133–141. <https://doi.org/10.20473/jaki.v13i2.2025.133-141>
- Konsili Vatikan II. (1993). *Gaudium et spes*. Dalam R. Hardawiryana (Penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II*. Obor.
- Milbank, J. (2006). *Theology and social theory: Beyond secular reason* (2nd ed.). Blackwell Publishing.
- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2020). *Changing expectations for the K–12 teacher workforce*. National Academies Press.
- Orobator, A. E. (Ed.). (2016). *The church we want: African Catholics look to Vatican III*. Orbis Books.
- Piketty, T. (2022). *A brief history of equality*. Belknap Press of Harvard University Press.
- Pontifical Council for Justice and Peace. (2004). *Compendium of the social doctrine of the Church*. Libreria Editrice Vaticana.
- Priyantomo, B. A., Suprayoga, & Iswanto, D. (2026). Public trust and digital governance: Social media sentiment on Indonesia's free nutritious meal program. *International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research and Technology*, 5(3), 1965–1976.
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Rev. ed.). Harvard University Press.
- Schreiter, R. J. (2015). *Constructing local theologies*. Orbis Books.

- Sorensen, L. C., & Ladd, H. F. (2020). The hidden costs of teacher turnover. *AERA Open*, 6(1), 1-24. <https://doi.org/10.1177/2332858420905812>
- Stiglitz, J. E. (2013). *The price of inequality: How today's divided society endangers our future*. W. Norton & Company.
- Verguet, S., Lividini, K., Gelli, A., Mafukidze, A., & Drake, L. (2020). The broader economic value of school feeding programs in low- and middle-income countries: Estimating the multi-sectoral returns to public health, human capital, social protection, and the local economy. *Frontiers in Public Health*, 8, 587046. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.587046>
- Wibowo, A., & Yuliani. (2026). Three decades of school meal program research: Bibliometric insights for governance and sustainability of Indonesia's free nutritious meal program. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 10(1), 198-218. <https://doi.org/10.36574/jpp.v10i1.745>
- Watkins, K. (2022). *School meals programmes and the education crisis: A financial landscape analysis*. Education Commission. <https://www.unesco.org/sdg4education2030/en/knowledge-hub/school-meals-programmes-and-education-crisis-financial-landscape-analysis>